

# **Dampak Kebijakan Schengen Uni Eropa Terhadap Euroscepticism di Nordik**

**Putri Novita Sari**

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60294*

*e-mail: [putrigalvi@gmail.com](mailto:putrigalvi@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

*In 2014 the number of issues discussing immigrants in the EU is 24% and by 2015 by 38%. And Euroscepticism is due to immigrants in Sweden at 48% while in Denmark it is 55% and both are Nordic countries. This is the reason why this paper is made. This paper will discuss the impact of Schengen policy on Euroscepticism in the Nordic. The approach that will be used is Globalization, welfare state and national interest. Globalization will be implemented in the form of schengen policy that causes the immigrant crisis in the Nordic. Nordic became the main goal of immigrants because it is a welfare state that has social security. And social security is a national interest maintained by native Nordic communities from immigrant immigrants to emerge euroscepticism. The effect was that a border control policy was made by the Nordic governments to press the immigrants who came and set up border patrols between the Nordic countries themselves.*

**Keywords:** *Schengen, Immigrant, Euroscepticism, Nordic, Border Control*

*Tahun 2014 jumlah isu yang membahas imigran di Uni Eropa sebesar 24% dan tahun 2015 sebesar 38%. Dan Euroscepticism yang dikarenakan imigran di Swedia sebesar 48% dan Denmark sebesar 55% dan keduanya merupakan negara Nordik. Hal tersebut menjadi alasan mengapa dibuat paper ini. Paper ini akan membahas tentang dampak kebijakan Schengen terhadap Euroscepticism di Nordik. Pendekatan yang akan digunakan adalah Globalisasi, welfare state dan national interest. Globalisasi akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan schengen yang menyebabkan krisis imigran di Nordik. Nordik menjadi tujuan utama imigran karena merupakan welfare state yang memiliki social security. Dan social security tersebut merupakan national interest yang dipertahankan masyarakat asli Nordik dari pendatang imigran sehingga muncul euroscepticism. Dampaknya adalah dibuatlah kebijakan kontrol perbatasan oleh pemerintah negara-negara Nordik untuk tekan imigran yang datang dan melakukan patroli perbatasan antar negara-negara Nordik sendiri.*

**Kata Kunci:** *Schengen, Imigran, Euroscepticism, Nordik, Pembatasan Wilayah*

## **Latar Belakang**

Pada tahun 2014 presentase tingkat ketidakpuasan terhadap Uni Eropa di Denmark sendiri yaitu 2%, Swedia 2% dan Finlandia 4%, dan Perancis sebanyak 4%. Namun, di tahun 2015 jumlah presentase terhadap *image* dari Uni Eropa (positif atau negatif). Tingkat negatif untuk Uni Eropa dari Denmark naik menjadi 17 %, Swedia 22%, Finlandia 16% dan Perancis 21%. Yang menjadi catatan adalah kenaikan dari presentase ini menunjukkan peningkatan *Euroscepticism* di kawasan Uni Eropa termasuk negara-negara Nordik seperti Swedia dan Denmark ( Eurobarometer Spring 2014 dan 2015).

*Euroscepticism* yang terjadi di anggota EU mayoritas disebabkan oleh kasus imigran terutama mengingat krisis imigran yang melanda kawasan Nordik. Imigran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah negara-negara di Nordik. Di tahun 2014-2015 sendiri ada banyak imigran yang berdatangan ke Nordik salah satunya ke Denmark dan Swedia Pada tahun 2014 sendiri di Swedia jumlah imigran yang merupakan *Asylum seekers* berjumlah 80.000 orang. Dan mayoritas merupakan pencari suaka dari Syiria dengan jumlah hampir mencapai 70.000 orang Syiria di tahun 2016 (sweden.se 2015).

Salah satu alasan mengapa banyak sekali imigran yang berasal dari Syiria adalah disebabkan oleh keputusan dari pemerintah Swedia untuk memberikan ijin tinggal dan menjadi penduduk permanen Swedia bagi orang-orang Syiria yang mencari suaka. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang-orang imigran yang datang kembali ke Swedia terutama para pencari suaka. Dan tentu apa dampak panjangnya bagi Swedia?. Tentu Swedia akan kualahan dan akhirnya membuat kebijakan untuk menghentikan gelombang-gelombang imigran yang terus berdatangan.

Di Denmark sendiri pada 2014-2015 tercatat ijin tinggal dan menjadi penduduk Denmark kebanyakan adalah masyarakat yang berasal dari Syiria yang tentu juga merupakan pencari suaka yang meningkat jumlahnya dari tahun 2014 yang hanya berjumlah 14.792 orang menjadi 21.316 di tahun 2015. Hal ini tidak berbeda jauh dari Swedia. Kebanyakan pencari suaka berasal dari Syiria dengan jumlah 8.608 orang di tahun 2015 (Danish Immigration Services 2016).

Kebijakan yang hampir serupa dengan Swedia juga dilakukan oleh Denmark. Karena jumlah imigran terus bertambah dan terjadi beberapa gelombang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pencari suaka. Kebijakan kontrol perbatasan juga dilakukan oleh Denmark dengan alasan yang serupa. Kebijakan kontrol perbatasan yang dilakukan Swedia dan Denmark meskipun di-*extend*. Untuk kebijakan kontrol perbatasan Swedia masih di-*extend* tiga bulan hingga tanggal 11 Februari 2017 (thelocal.se 2016) Dan Untuk kebijakan kontrol perbatasan Denmark masih di-*extend* hingga November 2016 (thelocal.dk 2016).

## **Kebijakan Schengen**

Dunia ini menuju era yang tanpa batas atau sering juga disebut dengan era globalisasi. *Globalization can refer to those spatial-temporal processes of change, which constitutes the fundament of the transformation of human concerns in an organization, linking together and expanding human activity across regions and continents. Without referring to the expansion in space of the*

*connections, there can be no clear and coherent formulation of the term globalization. A satisfactory definition of globalization must address each of these items: extension, intensity, celerity and impact (Held, dalam Cuterela 2012).*

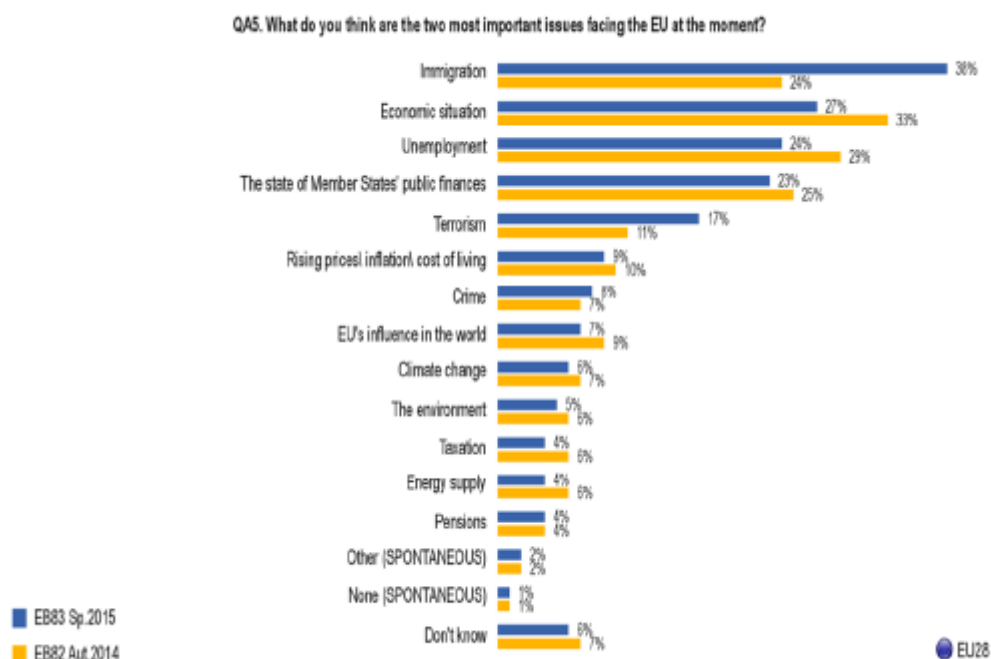
Intinya yaitu memperluas aktivitas manusia di seluruh wilayah dan benua tanpa mengacu pada perluasan koneksi antar ruang. Jadi dengan adanya globalisasi ini dunia nampak seakan *borderless* baik manusia, barang, maupun jasa dapat bergerak ke satu wilayah ke wilayah lain karena ada dukungan dari teknologi. Kemudahan bebas bergerak inilah yang pada akhirnya juga diterapkan pada salah satu kebijakan Uni Eropa yaitu *Schengen* yang menganut konsep yang sama dengan memanfaatkan kelebihan dari globalisasi juga.

*Schengen* merupakan kebijakan yang diterapkan di kawasan Eropa baik anggota Uni Eropa maupun Non Uni Eropa meskipun ada beberapa negara yang tidak menerapkan *Schengen* ini. *Schengen* adalah zona bebas paspor yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa. Jadi penduduk Eropa yang jumlahnya hampir mencapai 400 juta orang dapat berpergian lintas batas negara dengan bebas. Selain itu juga ada kebijakan visa bersama untuk *Schengen Area* untuk mempermudah kebebasan gerak melintasi batas negara (Livingstone 2015).

*Schengen Agreements* sendiri dimulai pada tahun 1995. Pada awalnya hanya melibatkan tujuh negara EU. Perkembangan yang dibawa oleh Perjanjian *Schengen* ini telah dimasukkan dalam badan peraturan yang mengatur Uni Eropa. Saat ini, Wilayah *Schengen* mencakup sebagian besar Negara UE, kecuali Bulgaria, Kroasia, Siprus, Irlandia, Rumania dan Inggris. Namun, untuk Bulgaria dan Rumania saat ini sedang dalam proses bergabung dengan Wilayah *Schengen*. Negara-negara Non-EU, Islandia, Norwegia, Swiss dan Liechtenstein telah bergabung dengan *Schengen Area* (European Commission 2017).

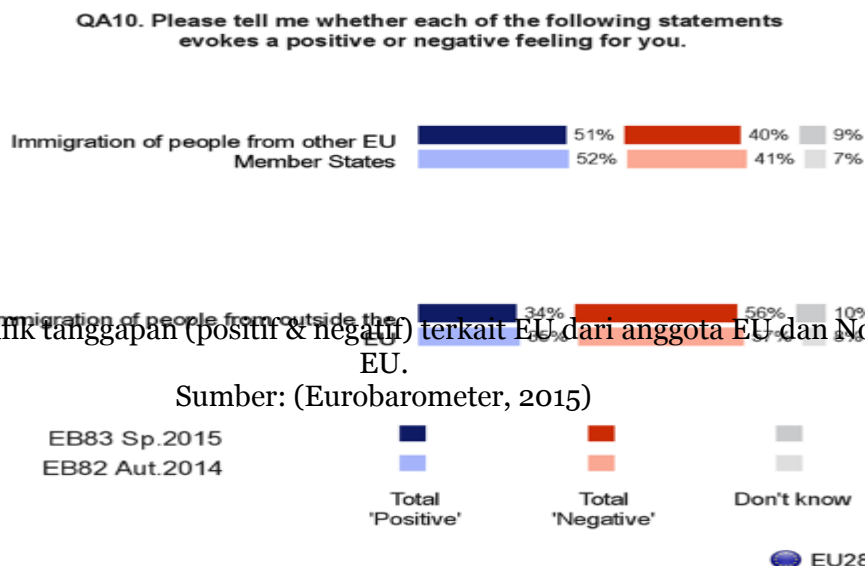
Perjanjian Maastricht memperkenalkan gagasan kewarganegaraan Uni Eropa untuk dinikmati secara otomatis oleh setiap warga negara dari Negara Anggota. Kewarganegaraan Uni Eropa inilah yang mendasari hak orang untuk bergerak dan berada dengan bebas di dalam wilayah Negara-negara Anggota. Perjanjian Lisbon menegaskan hak ini, yang juga termasuk dalam ketentuan umum mengenai Wilayah Kebebasan, Keamanan dan Keadilan.

Kenapa akhirnya *Schengen* dipilih sebagai pembahasan untuk menjawab *Euroscepticism* di Nordik terutama di Swedia dan Denmark adalah melihat jika di Uni Eropa yang banyak dipermasalahkan adalah kasus *Schengen*. Dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gbr 1. Grafik tentang isu yang sedang dibahas di EU (Sumber: eurobarometer 2015)

Dari grafik di atas dapat dilihat jika kasus yang paling banyak dipermasalahkan antara tahun 2014-2015 di Eropa adalah kasus imigran yang merupakan dampak dari kebijakan Schengen. Dibuktikan dengan grafik diatas isu yang paling banyak dipermasalahkan di Uni Eropa adalah imigran yang mencapai angka 24% di tahun 2014 dan 38% di tahun 2015 menunjukkan peningkatan pembahasan isu imigran. Dapat dilihat juga jika permasalahan yang terjadi di Uni Eropa posisi kedua yaitu situasi ekonomi yang mencapai angka 33% di tahun 2014 dan 27% di tahun 2015 yang menunjukkan terjadi penurunan pembahasan isu tersebut. dan Pengangguran di tahun 2014 pembahasan isu tersebut mencapai 29% dan di tahun 2015 tetap di angka 24% dan mengalami penurunan pembahasan. Namun tetap yang menjadi patokan adalah Imigran yang menjadi pembahasan utama di tahun 2014 dan 2015 sebagai dampak dari kebijakan *Schengen* Uni Eropa.

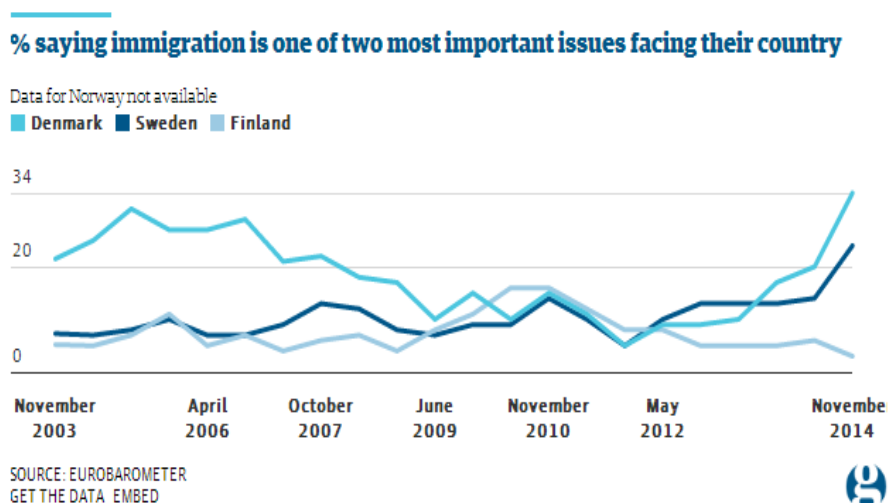


Gbr 2. Grafik tanggapan (positif & negatif) terkait EU dari anggota EU dan Non-EU.

Sumber: (Eurobarometer, 2015)

Dari grafik diatas dapat ditarik kesimpulan jika pada proses imigrasi yang terjadi melalui *Schengen* itu tadi memunculkan banyak opini publik baik mendukung maupun menolak imigran yang berasal dari dalam maupun luar Uni Eropa sendiri. seperti yang dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat dukungan terhadap imigran dari dalam EU lebih besar yaitu 52% lebih besar dari pada yang menolak (negatif) yaitu sebesar 41%. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat dukungan (positif) terhadap imigran dari dalam EU lebih besar yaitu 51% lebih besar dari pada yang menolak (negatif) yaitu sebesar 40%. Sedangkan untuk tingkat dukungan terhadap imigran dari luar EU sendiri di tahun 2014 yang mendukung (positif) sebesar 35%, sebaliknya untuk penolakan di tahun 2014 terhadap imigran dari luar EU sebesar 57% lebih besar dari pada yang mendukung. Selaras dengan tahun 2014, di tahun 2015 jumlah dukungan (positif) terhadap imigran dari luar EU sendiri lebih rendah dibanding yang menolak yaitu sebesar 34% dan yang menolak (negatif) sebesar 56%. Jadi dapat disimpulkan jika di jumlah dukungan terhadap imigran dari dalam EU baik 2014 maupun 2015 lebih tinggi yang mendukung (positif) dari pada menolak (negatif). Sedangkan jumlah dukungan terhadap imigran dari luar EU baik 2014 maupun 2015 lebih tinggi yang menolak (negatif) daripada mendukung (positif).

Hal tersebut dapat membuktikan jika ketakutan masyarakat Eropa dengan adanya imigran dari luar EU lebih besar daripada imigran dari dalam EU sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh *Schengen* dan Uni Eropa terutama terkait dengan opini publik dalam menanggapi fenomena imigran ini. ini juga dapat memicu munculnya *eurosepticism* yang disebabkan oleh schengen. Dan lebih pentingnya lagi kawasan yang disasar adalah kawasan Nordik yang memiliki *social welfare* yang sangat menggiurkan bagi imigran untuk menetap dan melangsungkan kehidupan barunya di tempat baru. Ada dua negara Nordik yang sering menjadi target dari imigran dikarenakan *Schengen* ini tadi.



Gbr 3. Grafik Imigrasi di negara Nordik (Denmark, Swedia dan Finlandia)  
Sumber: (theguardian, 2015)

Dua negara yang menjadi sorotan dari grafik diatas yang juga merupakan negara Nordik yaitu Denmark dan Swedia yang mengalami peningkatan pesat jumlah imigran pada November 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu

peningkatan Denmark yang hampir mencapai 34% sedangkan Swedia yang mencapai lebih dari 20% pada November 2014. Peningkatan tersebut menunjukkan jika kedua negara ini menjadi tujuan utama dari para imigran jika dibandingkan dengan negara Nordik lain seperti Finlandia dan lainnya. Hal ini membuktikan jika kawasan Nordik semakin menarik bagi imigran untuk menjadi tempat menetap dikarenakan *social welfare* yang dimiliki negara-negara Nordik sendiri.

### **Welfare State Model (Negara Nordik)**

Negara Nordik terkenal sebagai negara yang memiliki sistem negara kesejahteraan. Karena dianggap sebagai negara yang sejahtera maka banyak imigran yang tertarik untuk datang ke negara-negara Nordik. Pengertian dari *Welfare state* sendiri yaitu *The welfare state as "a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. The general term may cover a variety of forms of economic and social organization..."* (Britannica Online Encyclopedia, dalam Michálek and Pehr 2014).

Dapat ditarik kesimpulan jika *welfare state* adalah konsep dengan pemerintah sebagai peran kunci dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Dan fokus yang diterapkan adalah prinsip atas kesetaraan, pemerataan kekayaan dan tanggung jawab publik bagi yang tidak mampu untuk bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan *welfare state* ini sangat kental sekali dengan ciri negara-negara Nordik yang terkenal sebagai negara yang sejahtera. Yang tentu juga terkenal dengan pajak yang tinggi untuk digunakan sebagai subsidi silang dalam bentuk tunjangan sosial.

*Euroscepticism* juga terjadi pada negara-negara Nordik, baik yang menjadi anggota Uni Eropa maupun yang tidak bergabung. *Nordic state model* dari asal usulnya sendiri adalah skema asuransi yang berakhir dengan sistem pajak yang berbasis pendapatan universal atau umum. Jadi dapat dikatakan jika model kesejahteraan Nordik ini merupakan kombinasi orientasi kearah liberal, sosialis, radikal dan kesejahteraan yang menghasilkan kompromi bersama. Singkatnya menggabungkan antara demokrasi dan sosialis dalam bentuk *social welfare* melalui penerapan pajak yang tinggi untuk dijadikan tunjangan sosial bagi rakyat yang membutuhkan itu tadi.

Namun untuk pengembangannya baru dilakukan di tahun 1950an oleh Swedia dan tahun 1970an oleh Finlandia sebelum krisis di tahun 1980an. Dan melalui beberapa tahapan di Finlandia diawali dengan undang-undang tunjangan anak, pembayaran tingkat tinggi dan universal. Kemudian dilanjutkan di tahun 1960an-1970an tentang perencanaan ekonomi atau disebut juga dengan korporatisme sosial. Hal yang dilakukan adalah pengembangan negara sosial dalam wujud reformasi pensiun, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, penitipan anak dan layanan sosial lainnya. dan terakhir adalah ekonomi pasar di tahun 1980an dengan menekankan pada pengembangan pasar, privatisasi dan kritik terhadap *welfare state*. Serta diperkirakan jika ekonomi pasar akan berkembang pada dasar negara kesejahteraan yang kuat (Roos n.d).

Jaminan sosial inilah yang pada akhirnya membawa banyak sekali imigran untuk datang ke negara-negara Nordik. Dua negara Nordik yang mengeluarkan *budget* tinggi untuk *social welfare* salah satunya adalah Denmark dan Swedia dan keduanya juga merupakan negara Nordik yang memiliki *social security* atau tunjangan sosial bagi rakyatnya. Tunjangan sosial tersebut dapat berupa tunjangan pensiun, kesehatan, keselamatan, tempat tinggal, distribusi pendapatan, pendidikan dan lain sebagainya. Di tahun 2015 *budget* yang dikeluarkan Swedia untuk *social welfare* adalah 26,7% dan ditahun 2016 mencapai 27,1%. Sedangkan Denmark Di tahun 2015 *budget* yang dikeluarkan untuk *social welfare* adalah 28,8% dan ditahun 2016 mencapai 28,7% (OECD 2017).

Hal tersebut tentu semakin menarik imigran untuk berbondong-bondong datang terutama melihat adanya kebijakan *schengen* yang semakin mempermudah imigran untuk datang ke negara tersebut. Ada berbagai macam alasan mengapa banyak Imigran datang ke Nordik dan salah satunya adalah *Social Welfare* yang dianggap menjanjikan bagi para imigran. Datang ke negara yang menampung imigran agar bisa bertahan hidup serta mendapatkan jaminan sosial tentu merupakan mimpi dari kebanyakan imigran. Hal inilah yang akhirnya diresahkan *nattive* dari negara-negara nordik terutama Denmark dan Swedia karena merasa tidak adil jika masyarakat imigran juga mendapat tunjangan sosial sedangkan *nattive* dikenakan pajak tinggi agar *social security* tersebut bisa berjalan.

### **Euroscepticism di Nordik**

Menjadi negara yang tergabung dalam *suprastate* seperti Uni Eropa tentu mengharuskan suatu negara untuk terikat atas kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa itu sendiri. Namun, ternyata dengan berkurangnya sedikit kedaulatan dikarenakan menjadi anggota dari *suprastate* seperti Uni Eropa membuat banyak tanggapan dari rakyat negara-negara anggota Uni Eropa tersebut. Nordik yang mayoritas dikenal dengan kesejahteraannya juga memiliki sikap dalam hal ini. *Euroscepticism* muncul untuk mempertahankan *National Interest* dari negara-negara Nordik sendiri.

*National interest* menjadi alasan mengapa sikap tersebut diambil karena ada sesuatu yang ingin dipertahankan. Seperti yang dijelaskan berikut: *the national interest denotes at the very least the survival of the state. as benjamin frankel post it. "there is no debate among realist... that, at a minimum, states are worried about their security and that they act vigilantly to enhance that security in an environment which offer them no choice but to do so" (1996, lx dalam Welch n.d).*

Jadi negara-negara merasa khawatir atas keamanan negara dan rakyatnya. Sehingga, bertindak waspada dengan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar sebagai respon dari hal tersebut serta tidak ada pilihan lain selain melakukannya. Jika dikorelasikan dengan *Euroscepticism* dan kebijakan yang diambil pemerintah Nordik terutama Swedia dan Denmark yaitu *Control border* merupakan bentuk kewaspadaan akan arus imigran yang terus berdatangan di kawasan Nordik yang merupakan *welfare state*.

Dan *national interest* yang ingin dipertahankan oleh negara-negara Nordik adalah terkait dengan *social security* karena dengan datangnya imigran maka

akan terbagi *social security* yang seharusnya untuk *Native* justru malah untuk imigran yang mayoritas pendatang. Hal ini yang jugalah yang membuat *Euroscepticism* di Nordik semakin besar. Dapat dikatakan juga jika salah satu bentuk tanggapannya adalah *Euroscepticism*.

*The meaning of the word scepticism has diffused from its reference to the classical sceptics to mean 'an attitude of doubt or a disposition of disbelief.' Euroscepticism refers to scepticism about Europe or European integration. According to the Oxford English Dictionary (Simpson, 2006 dalam Hooghe and Marks, 2007). Maksud dari Euroscepticism atau Euroskeptisisme sendiri adalah sikap ragu atau ketidakpercayaan terhadap integrasi eropa atau Uni Eropa itu sendiri. Ketidakpercayaan serta disposisi negatif terhadap Uni Eropa ini tidak hanya terkait tentang kebijakan, institusi EU sendiri serta terkait dengan prinsip-prinsip dari Uni Eropa tersebut.*

Euroskeptisisme merupakan bagaimana opini publik menanggapi kebijakan, institusi dan prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Dan sikap skeptis yang ditunjukkan ini karena pada dasarnya merupakan kekhawatiran dari publik anggota EU atas kebijakan dan prinsip yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara. Euroskeptisisme tersebut dapat berdampak pada praktik demokrasi, kurangnya rasa percaya, penurunan jumlah pemilih serta partisipasi politik dan intensifikasi terkait ketidakamanan disektor ekonomi dan budaya.

Seperti yang ditunjukkan dalam Eurobarometer tentang opini Publik Uni Eropa Pada tahun 2014 presentase tingkat ketidakpuasan terhadap Uni Eropa di Denmark sendiri yaitu 2%, Swedia 2% dan Finlandia 4%, dan Perancis sebanyak 4% Namun, di tahun 2015 jumlah presentase terhadap *image* dari Uni Eropa (positif atau negatif). Tingkat negatif untuk Uni Eropa dari Denmark naik menjadi 17 %, Swedia 22%, Finlandia 16% dan Perancis 21%. Yang menjadi catatan adalah kenaikan dari presentase ini menunjukkan peningkatan *Euroscepticism* di kawasan Uni Eropa termasuk negara-negara Nordik sendiri seperti Swedia dan Denmark (Eurobarometer Spring 2014 dan 2015). Hal tersebut tentu menjadi sebuah pembuktian jika tingkat skeptis terhadap kebijakan Uni Eropa akan berdampak pada sikap skeptis terhadap Uni Eropa itu sendiri atau dikenal juga dengan *Euroscepticism*.

*Euroscepticism* sendiri juga tidak lepas dari sesuatu seperti makroekonomi, peningkatan inflasi dan pengangguran dan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal seperti itulah yang membuat euroskeptisisme masyarakat Eropa semakin besar. Tak hanya dari opini publik. Euroskeptisisme juga berasal dari partai politik nasional. Seperti yang terjadi di Skandinavia dan Inggris yang Euroskeptisisme berasal dari bagaimana pihak yang kepentingan negara melihat Uni Eropa sebagai apa. Euroskeptisisme Skandinavia terhadap Uni Eropa merupakan pertahanan terhadap kedaulatan nasional. Pertahanan yang dimaksudkan adalah terkait dengan kepentingan nasional Skandinavia seperti *Social Security* itu sendiri.

Sedangkan untuk kawasan mediterania masyarakat bersama elit politik konsisten dalam melihat keanggotaan dibawah Uni Eropa yang membawa kemakmuran, demokrasi dan pengaruh pada dunia. Sebaliknya, untuk partai kanan radikal melihat hal tersebut sebagai mobilisasi nasionalis dan sentimen anti orang asing terutama untuk kawasan Eropa Selatan.



### **Akar atau Sumber dari Euroscepticism**

*Euroscepticism* tentu tidak serta merta terjadi begitu saja. *Euroscepticism* terjadi karena beberapa alasan yang bisa menjadi sumber *Euroscepticism* tersebut berasal. Akar dari *Euroscepticism* tersebut dibagi beberapa tipe yaitu:

#### ***The Nationalist type (SOFT-MEDIUM EUROSCEPTICISM).***

*This euroscepticism is composed by De Gaulle's descendants, and on the left side by the communists (Mélanchon nowadays) or one part of the socialists. They accept cooperation, but they are against integration. It has always been a problem for them to have a large and really integrated EU because it represents a threat to the nation and to sovereignty.*

#### ***The Euro-critic and disenchanted type = a utilitarian Euroscepticism (SOFT-HARD EUROSCEPTICISM).***

*This kind of Euroscepticism is disappointed by the EU system and the way EU is conducted. One part is reformist; they aspire to change the EU system. They criticize the lack of democracy, the lack of transparency, and austerity policies etc. The other part is just disappointed, marked by apathy. Their attitudes toward the EU reflect their positioning toward the national political system.*

#### ***The Populist Type (HARD EUROSCEPTICISM).***

*Euroscepticism is an extension to their national anti-system attitude. Rejection of centralization, elitism and bureaucracy are applied to the EU through their Eurosceptic position. (Alibert, 2015)*

Maksud dari ketiga tipe tersebut adalah pertama, tipe nasionalis atau *Soft-Medium Euroscepticism* dengan inti yang dibahas yaitu menerima kerjasama namun menentang integrasi, karena integrasi dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. Kedua, yaitu tipe *Eurocitic* atau *Soft-Hard Euroscepticism* dengan inti yang dibahas yaitu sebagai reformis yang ingin mengubah sistem EU serta mengeluarkan beberapa kritik terkait kurangnya demokrasi dan transparansi serta kurangnya penghematan kebijakan dalam EU. Tipe satu ini juga cenderung apatis. Terakhir, tipe populis atau *Hard Euroscepticism* dengan inti yang dibahas yaitu perluasan dari sikap anti sistem nasional di negara masing-masing. Ditandai dengan anti sentraisasi, elitisme dan birokrasi yang ada di EU.

Figure 2. Levels of Party-Based Euroscepticism by Levels of Public Euroscepticism

		Low Levels of Public Euroscepticism	High Levels of Public Euroscepticism
Low Party-Based Euroscepticism	Spain Bulgaria Greece Ireland Germany Portugal Belgium Luxembourg Italy Netherlands		Slovenia Finland Lithuania
High Party-Based Euroscepticism	Romania France Slovakia Hungary		Sweden Austria Latvia Estonia United Kingdom Denmark Czech Republic Poland

Gbr 4. Tabel jenis Eurocepticism di negara anggota EU dan Non EU  
Sumber: (Taggart and Szczerbiak, 2002)

Setelah diperhatikan jika ternyata negara dengan Eurocepticism yang tinggi dilihat opini publik maupun tanggapan dari partai yang memiliki Eurocepticism tinggi salah satunya Swedia dan Denmark yang merupakan anggota negara Nordik yang terkenal dengan social welfare. Hal tersebut membuktikan jika respon partai dan publik terhadap tingkat Eurocepticism cukup tinggi melihat beberapa negara hanya mengalami Eurocepticism hanya pada satu pihak saja baik partai politik maupun hanya pada publik saja. Eurocepticism seperti ini tentu bukan tidak beralasan tentu saja memiliki alasan yang kuat hingga akhirnya tingkat Eurocepticism di Swedia dan Denmark cukup tinggi baik di partai politik maupun di publik.

Untuk lebih memperjelas dari apa yang telah disampaikan, berikut adalah tabel grafik yang menunjukkan dalam sektor apa saja Eurocepticism yang terjadi pada Swedia dan Denmark.

	Immigra-tion	Economic situation	Unem-ployment	The state of Member States' public finances	Terrorism	Rising prices (inflation), cost of living	Crime	EU's influence in the world	Climate change	The environ-ment	Taxation	Energy supply	Pensions
EU28	38%	27%	24%	23%	17%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	4%	4%
BE	39%	25%	26%	21%	20%	12%	11%	4%	6%	7%	5%	4%	9%
BG	37%	24%	9%	12%	25%	8%	11%	7%	6%	6%	2%	8%	2%
CZ	44%	18%	13%	26%	35%	10%	10%	11%	4%	5%	2%	3%	3%
DK	50%	30%	26%	17%	18%	3%	8%	8%	14%	8%	1%	3%	1%
DE	55%	18%	19%	34%	15%	7%	7%	8%	7%	4%	1%	4%	2%
EE	54%	22%	9%	31%	17%	11%	5%	9%	1%	3%	5%	5%	3%
IE	23%	27%	31%	18%	14%	14%	8%	10%	7%	5%	9%	5%	3%
EL	27%	40%	32%	33%	11%	8%	8%	14%	2%	4%	5%	2%	2%
ES	29%	37%	32%	20%	16%	9%	3%	5%	3%	3%	5%	4%	3%
FR	34%	30%	29%	17%	19%	11%	7%	7%	7%	8%	2%	4%	4%
HR	22%	24%	25%	24%	24%	15%	13%	11%	5%	3%	3%	4%	4%
IT	43%	29%	32%	16%	19%	7%	11%	4%	3%	4%	11%	3%	6%
CY	20%	47%	43%	16%	15%	7%	9%	5%	1%	1%	6%	1%	1%
LV	36%	24%	14%	26%	15%	9%	8%	10%	4%	2%	6%	4%	4%
LT	31%	24%	13%	21%	20%	14%	11%	10%	8%	2%	7%	5%	2%
LU	45%	19%	30%	24%	18%	12%	8%	8%	5%	5%	3%	3%	3%
HU	43%	28%	18%	28%	20%	9%	11%	7%	7%	4%	3%	8%	5%
MT	55%	21%	11%	17%	27%	3%	7%	3%	5%	5%	2%	3%	3%
NL	49%	35%	20%	38%	18%	5%	5%	10%	5%	4%	2%	3%	1%
AT	37%	28%	26%	38%	8%	15%	9%	8%	7%	8%	4%	3%	4%
PL	24%	29%	20%	16%	22%	14%	6%	8%	6%	3%	6%	5%	7%
PT	16%	23%	32%	37%	12%	11%	5%	6%	3%	1%	5%	2%	5%
RO	21%	18%	10%	16%	23%	12%	16%	6%	7%	7%	7%	8%	5%
SI	31%	23%	26%	26%	13%	5%	15%	7%	5%	4%	4%	5%	2%
SK	35%	20%	24%	25%	18%	14%	8%	7%	6%	4%	3%	5%	5%
FI	24%	34%	23%	39%	9%	9%	9%	10%	15%	7%	3%	7%	2%
SE	48%	36%	27%	23%	9%	2%	3%	5%	19%	15%	0%	6%	1%
UK	36%	30%	20%	16%	15%	10%	7%	8%	3%	3%	4%	4%	2%

1st MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM  
2nd MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM  
3rd MOST FREQUENTLY MENTIONED ITEM

Gbr 5. Tabel tentang isu yang paling banyak dibahas di EU  
Sumber: (Sumber: eurobarometer 2015)

Tabel diatas terbagi atas beberapa sektor yang menyebabkan *Eurocepticism* seperti imigrasi, ekonomi, pengangguran, finansial anggota EU, terorisme, infasi pada biaya hidup, kejahatan, pengaruh EU di dunia, perubahan iklim, lingkungan, suplai energi dan pensiun. Dan Warna merah menjadi tanda jika *Eurocepticism* yang dialami paling besar ada pada sektor tertentu. Swedia dan Denmark sendiri, sama-sama mengalami *Eurocepticism* yang tinggi di sektor imigrasi. Bahkan Denmark mencapai angka 55% dan Swedia di angka 48% yang menunjukkan imigrasi merupakan sektor yang menjadi pemicu terbesar *Eurocepticism* di kedua negara Nordik tersebut.

Jika dikorelasikan antara kedua tabel diatas dapat diambil kesimpulan jika *Eurocepticism* yang terjadi di Swedia dan Denmark adalah merupakan *High Eurocepticism* yang berasal dari Partai dan masyarakat Swedia dan Denmark sendiri. dan dilihat dari penyebabnya dari tabel kedua dapat dilihat jika yang menjadi penyebab utama *Eurocepticism* yang dihadapi kedua negara tersebut adalah masalah Imigran.

Dampak dari *Eurocepticism* ini adalah akhirnya dibuatlah kebijakan yang memberlakukan *border control* kembali pada kedua negara Nordik ini karena dianggapnya jika imigran yang berasal dari *Schengen* ini merugikan kedua negara terutama dalam hal tunjangan sosial. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan jika pemerintah kedua negara telah membuat kebijakan terkait kasus imigran ini.

**Table 1: Temporary internal border controls in the Schengen area (situation on 12 April 2016)**

Schengen Member State	Dates applicable	Border crossings covered	Article of the Schengen Borders Code	Reason
Belgium	23 February – 12 April 2016	Border between the Province of West-Vlaanderen and France	25 - emergency reintroduction (maximum 2 months)	Expected influx of people seeking to reach the port area of Zeebrugge following the closure of migrant camps in Calais
Denmark	4 March - 3 May 2016 (initially 4 January to 3 March 2016)	All, especially sea and land borders with Germany	23 - foreseeable events (up to six months)	Big influx of persons seeking international protection
Norway	15 January - 13 April 2016 (initially 26 November 2015 to 15 January 2016)	All, especially ports and ferry connections	23 - foreseeable events (up to six months)	Continuous big influx of persons seeking international protection
Sweden	10 January – 8 May 2016 (initially 12 November 2015 to 9 January 2016)	All, especially southern and western harbours and Oresund bridge between Denmark and Sweden	23 - foreseeable events (up to six months)	Continuous big influx of persons seeking international protection
Austria	16 November - 15 May 2016 (initially 16 September to 15 November 2015)	All, especially Slovenia-Austria border, Hungary-Austria border and Italy-Austria border; only specific crossing points may be used	23 - foreseeable events (up to six months)	Continuous big influx of persons seeking international protection

Gbr 6. Tabel tentang Penerapan *Border Cotrol* di EU  
Sumber: (European Parliamentary Research Service 2016)

Alasan mengapa pada akhirnya tanggapan dari *Eurocepticism* yang terjadi di Swedia dan Denmark adalah memberikan kontrol pada perbatasan yaitu dikarenakan semakin banyaknya imigran yang masuk di kedua tengara tersebut. Tak hanya itu saja namun juga keluhan karena opini publik yang merasa tidak adil atas tunjangan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kepada imigran. Orang-orang *nattive* merasa jika pajak untuk tunjangan sosial yang membayar adalah *nattive* namun mengapa yang justru imigran yang merasakan tunjangan sosialnya. Akhirnya pemerintah Swedia dan Denmark memberlakukan kontrol perbatasan seperti yang terlihat pada tabel diatas.

Dari tabel diatas Denmark telah menerapkan kebijakan kontrol perbatasan mulai dari 4 maret-3 mei 2016 dengan batas wilayah yang dikontrol mencakup seluruh wilayah terutama laut dan daratan yang berbatasan dengan Jerman. Dan alasan mengapa dibuat kebijakan tersebut karena adanya banyak orang yang mencari perlindungan internasional. selain Denmark Swedia juga mengalami hal yang serupa. Swedia memberlakukan kontrol perbatasan pada tanggal 10 Januari-8 mei 2016. Wilayah yang di-cover meliputi seluruh wilayah terutama pelabuhan di Selatan dan Barat serta jembatan Öresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia. Alasannya serupa dengan Denmark yaitu ada banyaknya orang yang mencari perlindungan internasional. dan karena salah satu alasan *social security* yang dimiliki kedua negara Nordik ini tentu membuat banyaknya imigran yang mencari perlindungan internasional banyak yang datang ke Swedia dan Denmark itu tadi.

### **Kebijakan Schengen di Denmark dan Swedia**

Dampak dari *Eurocepticism* yang diakibatkan oleh *Schengen* yang membawa banyak imigran adalah tindakan tegas dari pemerintah lokal dalam mengatasi imigran yang berpotensi membawa kebencian dari warga *nattive* dikarenakan berebut untuk mendapat *social security* dari pemerintah nordik. Tindakan tersebut seperti yang dilakukan oleh dua negara Nordik yaitu Swedia dan Denmark.

Untuk mengurangi dampak dari *Eurocepticism* yang disebabkan oleh Imigran yang dibawa oleh *Schengen* ini maka diterapkan kebijakan *border control*. Kebijakan *border control* tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk anggota *Schengen*. Waktu untuk *border control* selama enam bulan. Ada beberapa negara yang mengikuti kebijakan tersebut dan salah satunya Swedia dan Denmark.

Pada saat musim gugur di tahun 2015 Swedia tidak dapat lagi menampung dan menjamin tempat tinggal layak bagi para pendatang baru. Layanan sosial dan pendidikan yang disediakan kotamadya tidak dapat lagi diberikan bagi imigran dikarenakan kasus hukum dan proses permohonan suaka yang masih belum dapat dijalankan dan masih terbengkalai. Di bulan Oktober kebijakan keras dilakukan pemerintah Swedia yaitu memberlakukan pembatasan bagi pencari suaka dan dikurangi drastis. Kebijakan lainnya yaitu hanya memberikan masa tinggal sementara dan hak atas reunifikasi dengan keluarga para imigran melalui undang-undang internasional. pada januari 2016 perbatasan *Schengen* kembali

diterapkan oleh Swedia. Bagi perusahaan bus, kereta api dan feri tidak lagi diizinkan membawa penumpang tanpa dokumen identitas dari negara tetangga Denmark atau Jerman ke Swedia (Parusel n.d).

Dengan adanya kebijakan tersebut membuat imigran yang datang ke Swedia menjadi turun. Kebijakan tegas yang dibuat oleh pemerintah Swedia memang didorong oleh ketakutan terhadap *Euroscepticism* yang dialami warga Swedia karena *Schengen* yang dianggap merugikan kawasan *Welfare State* seperti Swedia. Ketakutan akan *social security* akan terbagi dengan para imigran jika *schengen* diberlakukan secara bebas. Kebijakan pemerintah Swedia dengan memberlakukan pembatasan *Schengen* membuat penduduk Swedia merasa lega karena berkurangnya tekanan imigrasi di kawasan Swedia sendiri.

Namun pembatasan ini hanya berlaku sementara selama pemerintah Swedia mempersiapkan normalisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama dengan melakukan pembangunan ribuan apartemen sewa dengan harga terjangkau, langkah-langkah guna meningkatkan kemampuan pendatang baru untuk berintegrasi dalam pasar tenaga kerja, serta menyiapkan sejumlah staf guru dan dokter untuk sistem pendidikan dan kesejahteraan tetap berjalan.

Setelah mengetahui bagaimana tanggapan dan tindakan Swedia terkait *Euroscepticism* yang disebabkan oleh *Social Security* dan *Schengen*. Kini giliran mengetahui seperti apa tanggapan dan tindakan Denmark atas hal yang sama dengan yang dialami oleh Swedia.

*Overall, the European Union appears to be a clear project in Denmark, although there are, of course, differences of opinion across political parties and population groups. There is broad agreement among the Danish mainstream parties and voters that EU membership is a good thing. There is strong backing for the EU's single market, as long as it concerns the free movement of goods, services, and capital. However, it is a different matter when it comes to the free movement of people with regard to EU citizens' access to social benefits in Denmark and debates about building a European Social Union (Rasmussen and Sorensen 2016)*

Maksud dari pernyataan diatas adalah meskipun Denmark setuju dengan kebijakan Uni Eropa terkait dengan pasar tunggal dan fokusnya pada pergerakan barang, jasa dan modal namun berbeda dengan *free movement of people*. Bukan berarti dengan disetujuinya kebijakan bebas barang, jasa dan modal di Denmark oleh partai politik dan masyarakat Denmark maka untuk manusia juga demikian. Masyarakat dan partai Denmark memperlakukan pergerakan bebas orang-orang terutama yang berkaitan dengan akses warga negara Uni Eropa terhadap tunjangan sosial di Denmark. Hal tersebut membuktikan jika *Euroscepticism* di Denmark bisa disebabkan karena *social security* dan *Schengen* sedangkan gelombang imigran akan terus berangsur hingga dapat menyebabkan krisis imigran di masa mendatang.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Denmark terkait hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah Swedia. Denmark juga menerapkan kebijakan kontrol perbatasan guna mengatasi masalah imigran. Denmark memberlakukan kontrol perbatasan dengan Jerman selama sepuluh hari sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan *Schengen*. Bagi orang yang tidak memiliki

hukum dasar untuk tinggal di Denmark dan tidak mencari suaka maka akan di tolak masuk ke Denmark.

Pada tanggal 4 Januari 2016 Denmark kembali menerapkan kontrol perbatasan karena mengingat konsekuensi yang ditimbulkan dari penutupan perbatasan oleh Swedia bagi para imigran dan pencari suaka tanpa dokumen identifikasi yang diperlukan saat pergi ke Swedia. Dan ini membuat Denmark menghadapi resiko serius bagi kebijakan publik dan keamanan dalam negeri karena imigran ilegal dalam jumlah yang besar terdampar di wilayah Kopenhagen dalam waktu singkat ( Udlændinge-og Integrationsministeriet 2016 )

Namun kebijakan kontrol perbatasan ini selanjutnya di *Extended* hingga November 2016. Adapun pernyataan yang juga menjadi jawaban mengapa dilakukan kontrol perbatasan. *“In the current situation, whereby no sustainable solution has yet been found for securing Europe’s outer borders, I am satisfied that we are able to maintain border control until November 12th, 2016. We must protect our own borders until mutually agreeable solutions are found at the EU level,” Støjberg said in a statement (TheLocal.dk 2016)*

Kebijakan kontrol perbatasan yang dilakukan negara-negara Nordik seperti Swedia dan Denmark yang menjadi tujuan utama imigran merupakan sikap tegas kedua negara melihat belum adanya tindakan tegas dari Uni Eropa dalam mengatasi kasus imigran ini. seakan beban imigran diserahkan sepenuhnya kepada kedua negara ini. selain itu juga karena untuk mengatasi permasalahan yang nantinya akan dibawa oleh imigran tersebut. imigran akan membawa masalah sosial dan Ekonomi yang sebelumnya tidak ada. Hal ini tentu juga mengurangi tunjangan sosial karena harus terbagi oleh imigran.

Kelanjutan dari kebijakan *control border* dari negara-negara Nordik sendiri adalah dijalinnya kerjasama antara negara-negara Nordik dalam bentuk patroli perbatasan. Mengingat jika arus dan gelombang pengungsi serta imigran yang dibawa *schengen* akan terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Tentu saja dibutuhkan kerjasama dalam patroli perbatasan yang merupakan gerbang masuknya para imigran.

Dampak dari adanya *Control border* sendiri sebagai tanggapan dari Euroscepticism yang disebabkan oleh Schengen tentu banyak hal yang berkaitan dengan kerjasama antar negara Nordik termasuk Swedia dan Denmark yang merupakan tetangga dekat. Kontrol perbatasan antara Swedia dan Denmark sendiri mempengaruhi puluhan ribu penumpang transportasi *express* kedua negara. Selain itu juga menyebabkan dampak sosial ekonomi. jika pada kondisi *free cross border* mendatangkan keberhasilan ekonomi terutama dalam bentuk penunjang angka lapangan pekerjaan. Karena orang Swedia bisa mendapat keuntungan pekerjaan di Denmark daripada di Swedia yang mayoritas lebih sedikit jumlahnya.

## **Kesimpulan**

Kegagalan Uni Eropa dalam kebijakan *Schengen* terlihat dengan munculnya *Euroscepticism* di Nordik. *Euroscepticism* yang terjadi di Nordik merupakan dampak dari krisis imigran dikarenakan kebijakan *Schengen* yang diterapkan Uni Eropa. Denmark dan Swedia merupakan dua negara Nordik yang mengalami

dampak yang paling besar. Gelombang imigran yang datang ini mengancam *national interest* yang dipertahankan masyarakat Nordik termasuk Swedia dan Denmark yaitu *Social Security* yang menjadi salah satu alasan imigran berdatangan ke Nordik. Namun, tidak ada tanggapan dari Uni Eropa terkait krisis imigran. Akhirnya negara-negara Nordik membuat kebijakan untuk melakukan kontrol perbatasan sebagai respon dari krisis imigran yang menyebabkan *Eurocepticism* di Nordik. Dan untuk kembali menjalankan kerjasama di Nordik terkait hal ini maka dibuatlah kebijakan patroli perbatasan bersama negara-negara Nordik termasuk Swedia dan Denmark.

## Referensi

- Alibert, Juliette. 2015. Eurocepticism: the root causes and how to address them. Pdf
- Britannica online encyclopedia dalam Michálek, Slavomír. And pehr, Michal. 2014. Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. The institute of history, academy of Sciences of the czech republic iSbn 978-80-7286-216-0
- European Commission (2015). Standard Eurobarometer 83 Spring 2015. Public Opinion In The European Union. Brussels: European Commission.
- European commision, 2017. Schengen Area. (online) available at: [http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen\\_en](http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en)
- European Commission (2014). Standard Eurobarometer 81 Spring 2014. Public Opinion In The European Union. Brussels: European Commission.
- Held, David, dalam Cuterela, Sandu. 2012 . Globalization: Definition, Processes and Concepts. National Defense University.
- Johannessen. Frøydis, 2016. What effect will border controls have on Nordic cooperation?. (online). Available at: <http://www.norden.org/en/news-and-events/news/what-effect-will-border-controls-have-on-nordic-co-operation>
- J.P Roos. N.d. The Consequences Of The Crisis Of 1990's To The Nordic Wel Fare State: Finland And Sweden. (online) available at: <http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/nordsocp.htm>
- Livingstone, Emmet. 2015. What is Schengen (online) available at: <http://www.politico.eu/article/what-is-schengen-explainer-borders-europe-free-movement/>
- N.n. 1996 dalam Welch. A David. N.d, Moraity and "the National Interest". Pdf, Availabel at: <http://www.nyu.edu/classes/gmoran/Welch.pdf>
- OECD, 2017. Social Expenditure-Aggregated data. (online) Available at: [https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX\\_AGG](https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG)
- Simpson, J. (ed.) Oxford English Dictionary dalam Hooghe, Liesbet and Marks, Gary. 2007. Source of Eurocepticism. Palgrave Macmillan Ltd 0001-6810/07 \$30.00. pdf
- Taggart, Paul and Szczerbiak, Aleks. 2002. The Party Politics of Eurocepticism in EU Member and Candidate States. Sussex European Institute. University of Sussex, Arts A Building Falmer, Brighton.
- The Guardian, 2015. Why are anti-immigration parties so strong in the Nordic states? . (online) available at: <https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/19/rightwing-anti-immigration-parties-nordic-countries-denmark-sweden-finland-norway>.